



PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2023, Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 (tertanggal 27 Desember 2022).

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Muntok, 18 Januari 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.4. Sistematika Penyusunan	1 - 4
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
1.5.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 5
1.5.2. Kondisi Demografi.....	1 - 7
1.5.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 8
1.5.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 13
1.5.5. Sosial Budaya	1 - 18
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2023	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	2 - 2
2.4. Target Indikator Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	2 - 6
2.5. APBD Tahun 2023.....	2 - 9
BAB III PENUTUP.....	3 - 1

LAMPIRAN

- **PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- **FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2022	1 - 7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persentase)	1 - 9
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (Persentase)	1- 11
Tabel 2.1	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	2 - 2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.....	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	2 – 7
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	2 – 8
Tabel 2.5	Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.....	2-10
Tabel 2.6	Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.....	2-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Gambar 1.2	PDRB ADHB dan PDRB ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Juta Rupiah)	1 - 8
Gambar 1.3	PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Ribu Rupiah)	1 - 13
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1 - 17
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1 - 17
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)	1 - 18
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Tahun)	1 - 19
Gambar 1.8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Tahun)	1 - 19
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017- 2022 (Tahun)	1 - 20
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022	1 - 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 56 Seri E);
 13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 13 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika serta gambaran umum Kabupaten Bangka Barat.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

1.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.5.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

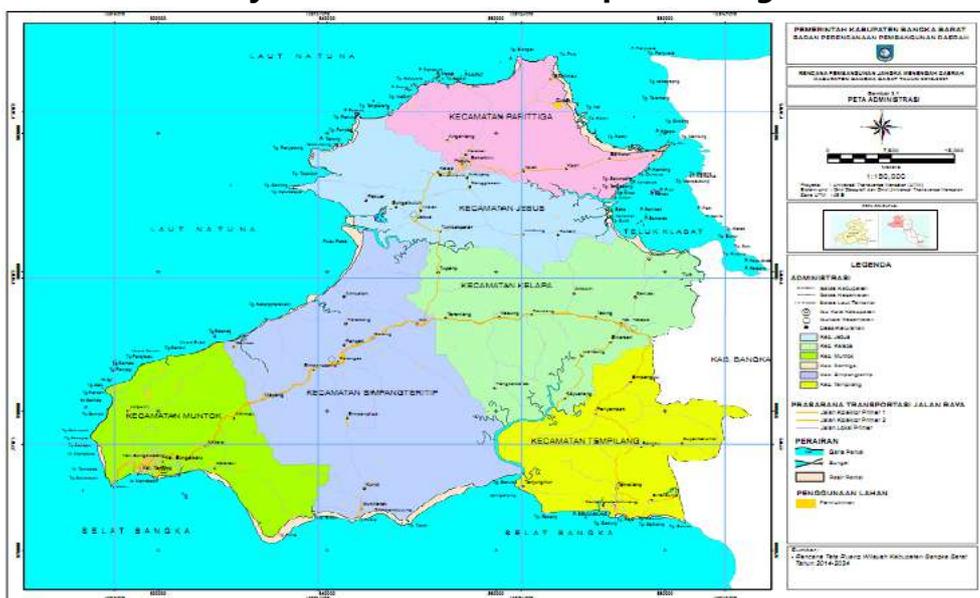
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaidaeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

1.5.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 206.937 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 53.577 jiwa atau 25,89 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.890 jiwa atau 11,06 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 terdiri dari 106.552 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.385 jiwa perempuan (48,51 persen) meningkat dari Tahun 2021 yang terdiri dari 106.205 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.041 jiwa perempuan (48,51 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Semester I Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muntok	27.138	26.439	53.577
2.	Simpangteritip	15.923	15.191	31.114
3.	Jebus	11.831	11.059	22.890
4.	Kelapa	18.215	16.736	34.951
5.	Tempilang	14.942	13.663	28.605
6.	Parittiga	18.503	17.297	35.800
	Total	106.552	100.385	206.937

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2022.

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen,

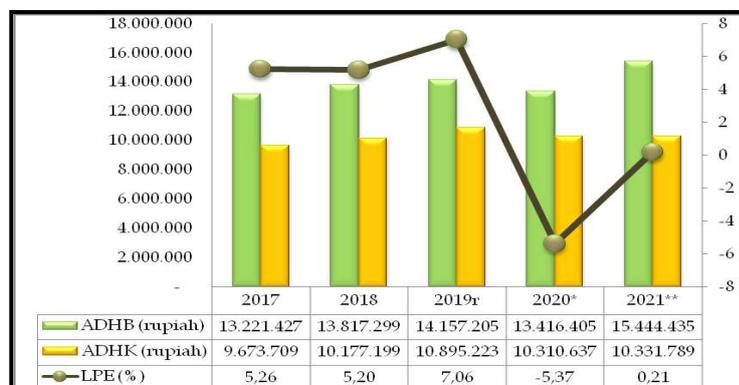
Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.5.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.

Gambar 1.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017 – 2021 (Juta Rupiah)



Keterangan : r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua

lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,21	1,57	-0,10	3,53	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	0,48	1,39	-13,87	10,22
C	Industri Pengolahan	6,53	6,97	12,46	-7,00	-4,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	8,55	15,06	19,30	8,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,59	0,01	2,01	7,50	3,97
F	Konstruksi	7,05	7,23	3,85	-1,46	1,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	4,53	2,55	-6,21	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	7,85	6,54	3,34	-13,37	8,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	2,80	3,70	-0,65	6,29
J	Informasi dan Komunikasi	8,43	10,51	12,55	18,44	5,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,04	6,55	7,14	-0,44	5,36
L	Real Estate	5,05	7,29	1,57	4,91	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	4,10	4,49	0,37	-9,11	4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,80	8,08	6,08	-0,63	4,64
P	Jasa Pendidikan	9,76	9,12	6,01	-0,76	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90	7,52	7,37	1,07	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,80	4,13	4,48	-4,69	2,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21

Keterangan : r) angka perbaikan *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 mencapai Rp 10,33 trilliun, meningkat dibandingkan

tahun 2020 yang bernilai sebesar Rp 10,31 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2021. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Selama tahun 2021, hampir seluruh kategori lapangan usaha tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu sektor saja yang tercatat mengalami kontraksi, yaitu kategori Industri Pengolahan. Kategori ini tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 4,52 persen. Hal ini membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana kategori ini mengalami kontraksi sebesar 7,00 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar di antaranya adalah kategori Pertambangan dan Penggalian, Jasa Kesehatan, dan Transportasi dan Pergudangan. Kategori Pertambangan dan Penggalian tercatat tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 10,22 persen di tahun 2021. Kemudian disusul oleh kategori Jasa Kesehatan yang tumbuh sebesar 9,31 persen. Selain itu, kategori Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh cukup besar di tahun 2021, yaitu sebesar 8,28 persen.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh capaian program dan sasaran pembangunan pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019*	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,11	12,06	11,34	13,25	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	10,71	9,48	8,31	7,50	8,71
C	Industri Pengolahan	42,20	44,03	45,61	42,99	45,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,66	7,22	7,51	7,84	7,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,00	14,55	14,06	14,07	13,27
H	Transportasi dan Pergudangan	0,93	0,96	0,99	0,93	0,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,20	1,26	1,40	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,33	0,37	0,45	0,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,42	0,45	0,47	0,45
L	Real Estate	2,01	2,09	2,08	2,33	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,52	4,73	5,16	4,71
P	Jasa Pendidikan	1,79	1,82	1,91	2,11	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,79	0,85	0,91	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,31	0,32	0,34	0,31
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : r) angka revisi *) angka sementara **) angka sangat sementara
 Sumber : Kabupaten Bangka Barat dalam angka, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 45,13 persen dan 13,27

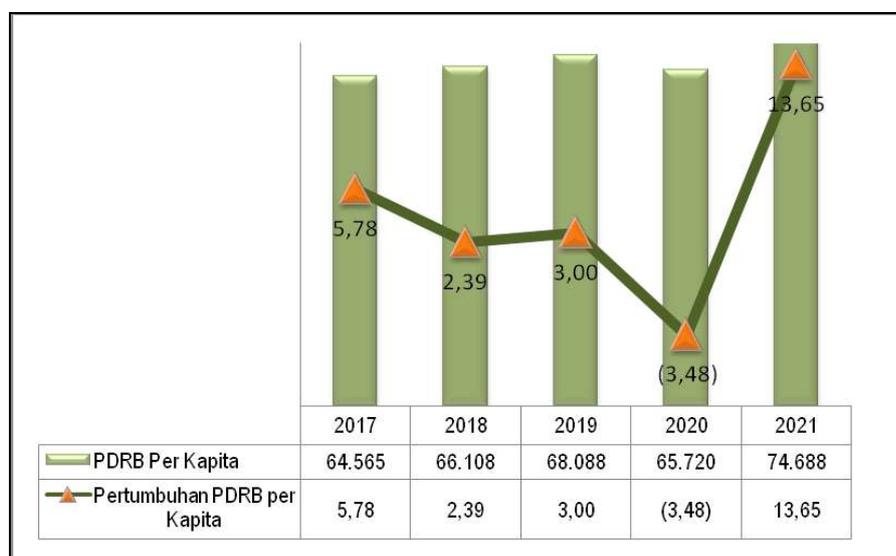
persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peranan sebesar 12,45 persen; disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,71 persen serta Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,16 persen.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 sebesar 42,20 persen menjadi 44,03 persen di tahun 2018. Kemudian kembali naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 45,61 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 42,99. Meskipun demikian di tahun 2021 nilai kontribusinya kembali meningkat menjadi 45,13 persen.

3) PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.3
PDRB per Kapita Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rupiah)



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022

PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2020 angka PDRB per kapita sebesar 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 74,68 juta rupiah.

1.5.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
 6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;

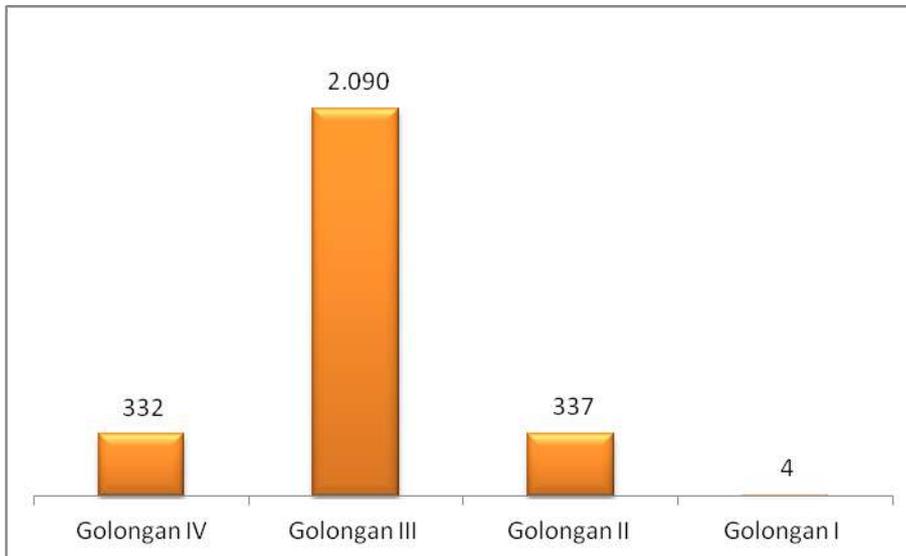
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
- f. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

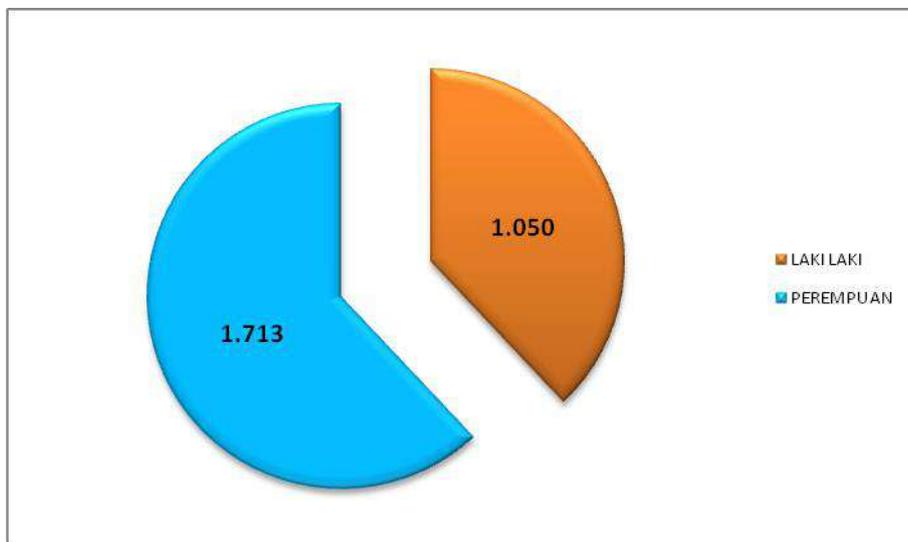
Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Desember 2022 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.763 orang.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2023

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022



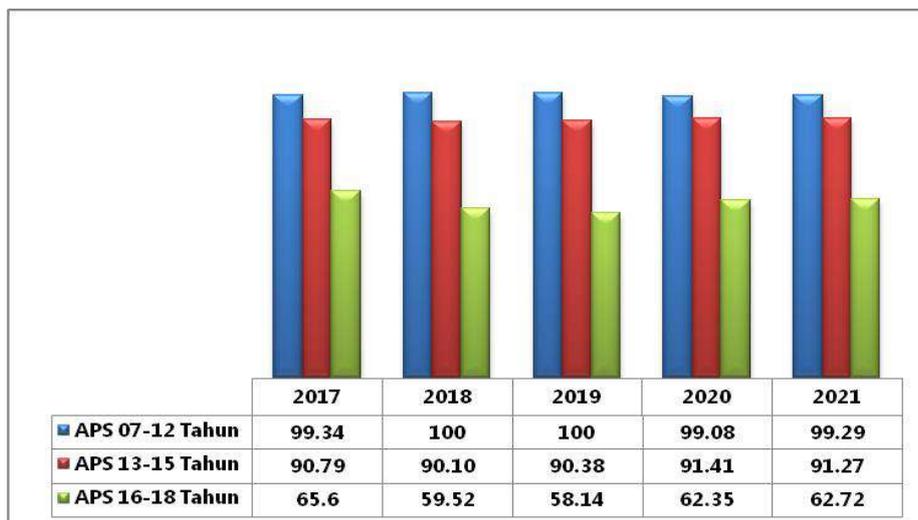
Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2023

1.5.5 Sosial Budaya

1) Pendidikan

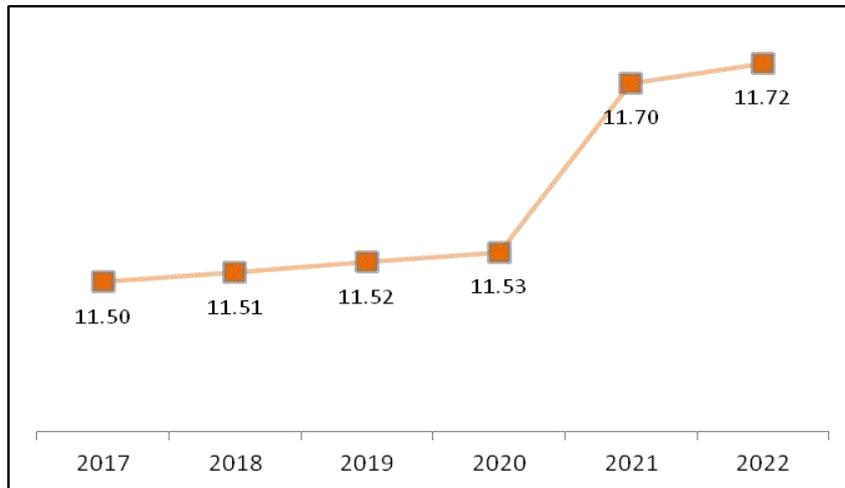
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.6
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)



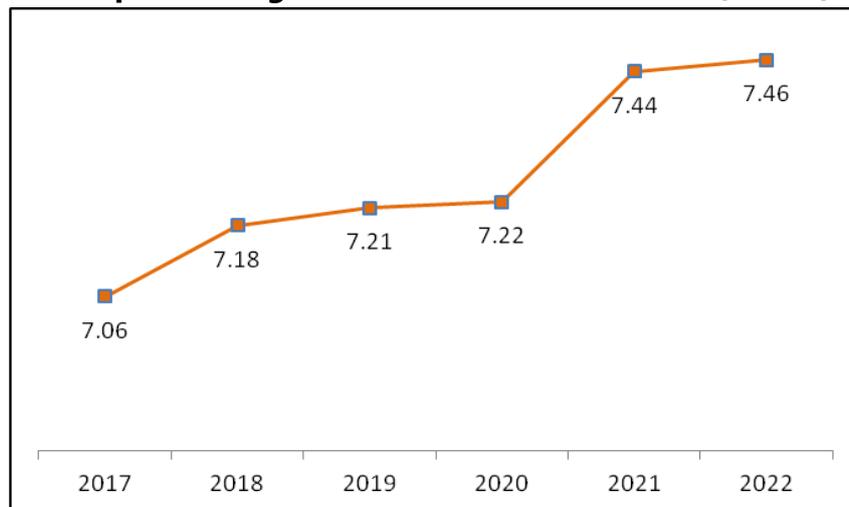
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 1.7
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 1.8
Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 (Tahun)



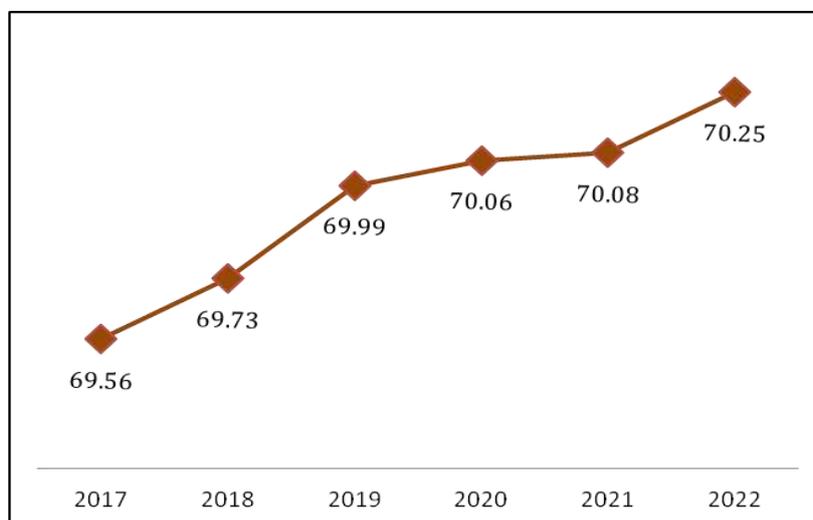
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH penduduk pada saat lahir dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Selama tiga tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2022, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,25 tahun. Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2017 hingga 2022. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

3) Penduduk Miskin

Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 adalah

5.300 Jiwa atau 2,48%. Jumlah penduduk miskin tersebut menurun jika dibandingkan Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak 5.850 jiwa atau 2,75%. Pulihnya ekonomi masyarakat setelah Pandemi *Covid-19* berlalu dengan ditunjukkan dengan meningkatnya kesehatan masyarakat, menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya daya beli masyarakat, serta kenaikan pertumbuhan ekonomi (kontraksi) sehingga menurunnya angka kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang paling rendah. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dengan jumlah penduduk miskin Provinsi yaitu sebanyak 66.780 jiwa atau 4,45% dan secara nasional dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.160.000 jiwa atau 9,54%, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih baik.

Gambar 1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023. Melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di Tahun 2023.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang diusung adalah **“PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH, PENINGKATAN OLAH RAGA PRESTASI YANG DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”**. Tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan yang selanjutnya mengarah pada fokus pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun berkenaan.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat tahun 2023. Adapun prioritas pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia; serta
4. Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023

Setelah memperhatikan data yang dikeluarkan BPS dan strategi yang digunakan dalam pencapaian indikator makro pembangunan berdasarkan hasil analisa, target indikator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No.	Indikator Makro	Satuan	Target
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,68
2.	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	12.791.000
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,86
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	2,63
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,75

Sumber : RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2023

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AHB)	$\frac{\text{PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1)}}{\text{PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1)}} \times 100$
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	$\frac{\text{PDRB lapangan usaha Industri Pengolahan - PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1)}}{\text{PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1)}} \times 100$
		Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor pariwisata}}{\text{total PDRB}} \times 100$
		Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa}}{\text{total PDRB}} \times 100$
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	$\frac{\text{Nilai Investasi tahun n} - \text{nilai investasi tahun n-1}}{\text{nilai investasi tahun n-1}} \times 100$
3.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	$\frac{\text{Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota}}{\text{jumlah desa/kelurahan}}$
		Indeks Bangunan Gedung	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKTL})$
		Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah}}{\text{jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan}} \times 100$
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	$\frac{\text{Bahaya}}{\text{jumlah desa rawan bencana}} \times \text{jumlah desa tangguh bencana}$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
			$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (dibagi) total penduduk (dikali) 100
6.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah pengangguran (dibagi) jumlah angkatan kerja (dikali) 100
7.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Jumlah SD dan SMP terakreditasi A (dibagi) total SD dan SMP (dikali) 100
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
		Prevalensi Stunting	Jumlah Balita Stunting (dibagi) jumlah balita (dikali) 100
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan (dibagi) IPM laki-laki
		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Hasil survei terhadap dimensi: taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Opini BPK	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
			Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Profesionalitas ASN	(nilai dimensi kualifikasi x bobot 25) + (nilai dimensi kompetensi x bobot 40) + (nilai dimensi kinerja x bobot 30) + (nilai dimensi disiplin x bobot 5)/ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)
13.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100

Sumber : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Target Indikator Tujuan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RKPD 2023
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,68 %
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.791.000 rupiah
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,86
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Cukup
5.	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,58

Sumber : RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 merujuk pada sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Untuk penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2023, mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2023.

Tabel 2.4.
Target Indikator Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RPJMD		Target RKPD 2023
			Satuan	Nilai	
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6	6
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,39	5,39
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,40	2,40
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,46	18,77
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917	917
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,70	0,70
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43	71,43
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	47,06	47,06
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi
5.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,63	2,63
6.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85	3,75
7.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,31	7,60
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,55	11,90

No.	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RPJMD		Target RKPD 2023
			Satuan	Nilai	
	pendidikan	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,86	24,86
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56	70,56
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7,46	7,46
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,82	90,82
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Madya
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Baik
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,56	71,56
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Cukup	Cukup
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,84	64,84
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,82	82,07
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,22	8,68

Sumber : RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

2.5. APBD TAHUN 2023

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja, didukung oleh program, kegiatan serta subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	890.150.345.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	70.265.927.500,00
Pajak Daerah	29.156.787.500,00
Retribusi Daerah	7.709.140.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.900.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	29.500.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	808.384.418.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.384.418.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.500.000.000,00
Pendapatan Hibah	500.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000.000,00
BELANJA	1.022.156.851.932,00
BELANJA OPERASI	745.288.747.873,00
Belanja Pegawai	377.058.624.544,00
Belanja Barang dan Jasa	333.135.959.851,00
Belanja Hibah	30.722.321.478,00
Belanja Bantuan Sosial	4.371.842.000,00
BELANJA MODAL	190.865.988.569,00
Belanja Modal Tanah	2.700.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.271.815.039,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.744.680.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.072.490.370,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.727.750.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.335.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	4.105.000.000,00
BELANJA TRANSFER	111.288.600.000,00

Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Belanja Bagi Hasil	3.686.592.750,00
Belanja Bantuan Keuangan	108.529.775.400,00
Total Surplus/(Defisit)	(132.006.506.432,00)
PEMBIAYAAN	132.006.506.432,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.006.506.432,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.906.506.432,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	132.006.506.432,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
SiLPA Daerah Tahun Berkenaan	-

Sumber : APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2023

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 141 program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp1.022.156.851.932,00.

Tabel 2.6
Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	252.676.300,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	587.660.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	202.754.800,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	264.065.100,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Perizinan Usaha Pertanian	4.500.000,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	309.209.400,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100.000.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	270.401.000,00
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.830.000,00
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	64.300.000,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	57.370.000,00
	Program Pengembangan UMKM	379.439.000,00
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	243.520.000,00
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	35.610.000,00
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	4.757.000,00
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1.310.000,00
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	300.000,00
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13.524.978.713,00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	25.400.000,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	15.050.000,00
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	44.912.800,00
	Program Pengelolaan Pelayaran	554.700.000,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.705.884.340,00
	Program Pemasaran Pariwisata	885.366.400,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.303.682.999,00
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	42.675.000,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	443.663.600,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	155.691.000,00
	Program Pembinaan Sejarah	137.075.550,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	484.833.000,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	310.090.000,00
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	12.320.000,00
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	438.630.000,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	105.335.000,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	42.694.000,00
	Program Pengembangan Ekspor	87.100.000,00
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	3.250.000,00
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	24.895.000,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	255.582.800,00
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83.300.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	91.460.000,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	774.358.000,00
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	69.178.933.800,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.716.995.000,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	3.118.132.500,00
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	48.180.000,00
	Program Penatagunaan Tanah	119.805.000,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	17.037.710.000,00
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	5.000.000.000,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	74.754.000,00
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	167.934.250,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.324.000,00
	Program Penghargaan Lingkungan	222.400.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Hidup Untuk Masyarakat	
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.200.000,00
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	3.200.000,00
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.200.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	199.682.000,00
	Program Pengelolaan Persampahan	9.052.612.410,00
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	15.000.000,00
	Program Penanggulangan Bencana	1.304.675.000,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	896.477.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.616.750.800,00
Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	229.325.000,00
	Program Rehabilitasi Sosial	2.253.230.000,00
	Program Penanganan Bencana	341.670.000,00
	Program Pemberdayaan Sosial	487.800.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.876.425.500,00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	163.900.000,00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	432.932.800,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.358.330,00
	Program Pengembangan Perumahan	735.065.000,00
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.188.075.000,00
	Program Kawasan Permukiman	1.155.310.000,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	300.000,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	2.932.880.570,00
Menurunnya Angka Pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	354.615.560,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	19.790.000,00
	Program Hubungan Industrial	8.110.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	89.023.833.000,00
	Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.150.000,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	199.428.500,00
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95.775.190.800,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	235.410.000,00
	Program Pengendalian Penduduk	172.855.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.965.704.500,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	237.303.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.049.081.600,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	800.190.000,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	468.992.202,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	70.920.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.282.832.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.472.560.000,00
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan		160.818.700,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		2.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		258.330.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		128.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak		378.921.300,00
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.469.922.620,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.368.470.000,00
	Program Koordinasi Ketenteraman dan	20.750.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Ketertiban Umum	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.266.200.000,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.673.440.000,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.650.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	84.452.500,00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	172.877.000,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.300.000,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	462.777.912.622,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	785.413.600,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	244.142.500,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	429.441.705,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.570.000,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	117.521.688.061,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	352.526.800,00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.315.847.000,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	281.602.000,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.634.676.840,00
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12.800.000,00
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	32.800.000,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
	Program Pengelolaan Arsip	25.410.000,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.341.745.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	654.554.000,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.027.200.000,00
	Program Kepegawaian Daerah	1.054.349.200,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	545.039.960,00
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	296.253.000,00
	Program Pencatatan Sipil	31.359.800,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.800.000,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.260.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.234.615.800,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.720.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	805.120.000,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	344.707.500,00
	Program Penataan Desa	30.467.500,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	106.560.000,00
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan		229.798.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Desa		18.340.000,00
Jumlah Belanja Daerah		1.022.156.851.932,00

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan.



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 18 Januari 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,39
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,4
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	18,77
2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,7
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	47,06
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,63
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,6
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,9
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,86
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7,46
9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,82
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
10	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,56
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Cukup
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,84
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,68

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	462.777.912.622
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	89.023.833.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	15.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17.150.000
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	95.775.190.800
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.049.081.600
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	235.410.000
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	237.303.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.716.750.800
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	800.190.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	15.000.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	468.992.202
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	70.920.000
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.037.710.000
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.000.000.000
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.178.933.800
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	74.754.000
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	774.358.000
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	735.065.000
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.155.310.000
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.188.075.000
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.932.880.570
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

		4.368.470.000
24	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	896.477.000
25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.304.675.000
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	487.800.000
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.253.230.000
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	229.325.000
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.670.000
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	354.615.560
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.790.000
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	8.110.000
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	135.000.000
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160.818.700
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258.330.000
36	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.000.000
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	128.000.000
38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	378.921.300
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	300.000
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	432.932.800
41	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	163.900.000
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	48.358.330
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	48.180.000
44	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.118.132.500
45	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	119.805.000
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.934.250
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	199.682.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	21.200.000
49	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	3.200.000

50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.324.000
51	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6.050.000
52	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	222.400.000
53	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.200.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.052.612.410
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	296.253.000
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	31.359.800
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.800.000
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.260.000
59	PROGRAM PENATAAN DESA	30.467.500
60	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	18.340.000
61	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	344.707.500
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	805.120.000
63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	172.855.000
64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.965.704.500
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.472.560.000
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.716.995.000
67	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	554.700.000
68	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	654.554.000
69	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.341.745.000
70	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.310.000
71	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.757.000
72	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000
73	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	243.520.000
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	35.610.000
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	57.370.000
76	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

		379.439.000
77	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	83.300.000
78	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	249.679.000
79	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	91.460.000
80	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	406.000.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.282.832.000
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.570.000
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	12.800.000
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	443.663.600
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	155.691.000
87	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	137.075.550
88	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	484.833.000
89	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	310.090.000
90	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	199.428.500
91	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	12.320.000
92	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	25.410.000
93	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	32.800.000
94	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	300.000
95	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	311.830.000
96	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	270.401.000
97	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.300.000
98	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	44.912.800
99	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.705.884.340
100	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	885.366.400
101	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	42.675.000
102	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.303.682.999
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

		252.676.300
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	587.660.000
105	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	309.209.400
106	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	264.065.100
107	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.500.000
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	202.754.800
109	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	438.630.000
110	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.250.000
111	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	105.335.000
112	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	42.694.000
113	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	87.100.000
114	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	255.582.800
115	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	24.895.000
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.524.978.713
117	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.400.000
118	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.050.000
119	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.014.962.580
120	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	336.358.000
121	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.634.676.840
122	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	785.413.600
123	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	244.142.500
124	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	117.521.688.061
125	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	352.526.800
126	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.107.135.000
127	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.054.349.200
128	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.027.200.000
129	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	429.441.705
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.315.847.000

131	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	281.602.000
132	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.234.615.800
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.876.425.500
134	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.750.000
135	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	292.300.000
136	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.720.000
137	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.266.200.000
138	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.673.440.000
139	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	29.650.000
140	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	84.452.500
141	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	172.877.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG		1.022.156.851.932

Muntok, 18 Januari 2023
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	89.023.833.000,00
	Program Pengembangan Kurikulum	15.000.000,00
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	17.150.000,00
	Program Pembinaan Perpustakaan	199.428.500,00
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95.775.190.800,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	235.410.000,00
	Program Pengendalian Penduduk	172.855.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.965.704.500,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	237.303.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.049.081.600,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	800.190.000,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	468.992.202,00
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	70.920.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	27.282.832.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.472.560.000,00
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan		160.818.700,00
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		2.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		258.330.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		128.000.000,00
Program Perlindungan Khusus Anak		378.921.300,00
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.469.922.620,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.368.470.000,00
	Program Koordinasi Ketenteraman dan	20.750.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Ketertiban Umum	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.266.200.000,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.673.440.000,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.650.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	84.452.500,00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	172.877.000,00
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	6.050.000,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	292.300.000,00
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	462.777.912.622,00
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	785.413.600,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	244.142.500,00
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	429.441.705,00
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	83.570.000,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	117.521.688.061,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	352.526.800,00
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.315.847.000,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	281.602.000,00
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.634.676.840,00
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	12.800.000,00
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	32.800.000,00
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	300.000,00
	Program Pengelolaan Arsip	25.410.000,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.341.745.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	654.554.000,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.027.200.000,00
	Program Kepegawaian Daerah	1.054.349.200,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	545.039.960,00
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	296.253.000,00
	Program Pencatatan Sipil	31.359.800,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.800.000,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.260.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.234.615.800,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.720.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	805.120.000,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	344.707.500,00
	Program Penataan Desa	30.467.500,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	106.560.000,00
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan		229.798.000,00
Program Peningkatan Kerjasama Desa		18.340.000,00
Jumlah Belanja Daerah		1.022.156.851.932,00

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 72 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dalam mewujudkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Target kinerja di tahun ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ke depan.



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 18 Januari 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,39
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,4
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	18,77
2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,7
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	47,06
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
5	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,63
6	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
7	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,6
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,9
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,86
8	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7,46
9	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,82
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
10	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
11	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,56
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Cukup
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,84
12	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07
13	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,68

**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	462.777.912.622
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	89.023.833.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	15.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17.150.000
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	95.775.190.800
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.049.081.600
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	235.410.000
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	237.303.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.716.750.800
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	800.190.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	15.000.000
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	468.992.202
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	70.920.000
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	17.037.710.000
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.000.000.000
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.178.933.800
17	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	74.754.000
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	774.358.000
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	735.065.000
20	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.155.310.000
21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.188.075.000
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.932.880.570
23	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

		4.368.470.000
24	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	896.477.000
25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.304.675.000
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	487.800.000
27	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.253.230.000
28	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	229.325.000
29	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	341.670.000
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	354.615.560
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	19.790.000
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	8.110.000
33	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	135.000.000
34	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	160.818.700
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	258.330.000
36	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.000.000
37	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	128.000.000
38	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	378.921.300
39	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	300.000
40	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	432.932.800
41	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	163.900.000
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	48.358.330
43	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	48.180.000
44	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.118.132.500
45	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	119.805.000
46	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.934.250
47	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	199.682.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	21.200.000
49	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	3.200.000

50	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	29.324.000
51	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6.050.000
52	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	222.400.000
53	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.200.000
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.052.612.410
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	296.253.000
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	31.359.800
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.800.000
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.260.000
59	PROGRAM PENATAAN DESA	30.467.500
60	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	18.340.000
61	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	344.707.500
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	805.120.000
63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	172.855.000
64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.965.704.500
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.472.560.000
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	5.716.995.000
67	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	554.700.000
68	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	654.554.000
69	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.341.745.000
70	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1.310.000
71	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.757.000
72	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	300.000
73	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	243.520.000
74	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	35.610.000
75	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	57.370.000
76	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

		379.439.000
77	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	83.300.000
78	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	249.679.000
79	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	91.460.000
80	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	406.000.000
81	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	27.282.832.000
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000
83	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	83.570.000
84	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	12.800.000
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	443.663.600
86	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	155.691.000
87	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	137.075.550
88	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	484.833.000
89	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	310.090.000
90	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	199.428.500
91	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	12.320.000
92	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	25.410.000
93	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	32.800.000
94	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	300.000
95	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	311.830.000
96	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	270.401.000
97	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.300.000
98	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	44.912.800
99	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.705.884.340
100	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	885.366.400
101	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	42.675.000
102	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.303.682.999
103	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

		252.676.300
104	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	587.660.000
105	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	309.209.400
106	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	264.065.100
107	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	4.500.000
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	202.754.800
109	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	438.630.000
110	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.250.000
111	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	105.335.000
112	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	42.694.000
113	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	87.100.000
114	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	255.582.800
115	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	24.895.000
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	13.524.978.713
117	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.400.000
118	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.050.000
119	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.014.962.580
120	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	336.358.000
121	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.634.676.840
122	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	785.413.600
123	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	244.142.500
124	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	117.521.688.061
125	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	352.526.800
126	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.107.135.000
127	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.054.349.200
128	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.027.200.000
129	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	429.441.705
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.315.847.000

131	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	281.602.000
132	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.234.615.800
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.876.425.500
134	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.750.000
135	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	292.300.000
136	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.720.000
137	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.266.200.000
138	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.673.440.000
139	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	29.650.000
140	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	84.452.500
141	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	172.877.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG		1.022.156.851.932

Muntok, 18 Januari 2023
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.